

KREDIT PROGRAM ADAPTIF SEBAGAI PILAR INKLUSI KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN UMKM DIGITAL

¹²Noni Antika Khairunnisah, A. Fandir
^{1,2} Akademi Bisnis Lombok

Article Info	ABSTRACT (10 PT)
Article history: Accepted: Date, Month, Year Publish: Date, Month, Year	Transformasi sistem pembiayaan melalui digitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan LPDB-KUMKM mencerminkan komitmen strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM digital dan memperkuat inklusi keuangan nasional. Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas skema kredit adaptif digital terhadap perluasan akses pembiayaan dan dampaknya terhadap produktivitas UMKM. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kebijakan dan literatur, hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan mempercepat proses pengajuan, mempermudah pelaporan, serta membuka peluang pendanaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya tidak bankable. Tantangan seperti rendahnya literasi digital, risiko kredit, dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, kebijakan pendukung harus mencakup pelatihan literasi, integrasi data digital, dan penguatan kelembagaan agar program ini mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Keywords: Adaptive Programme UMKM Digital Financial Inclusion	
Article Info	Abstract (10 Pt)
Article history: Accepted: Date, Month, Year Published: Date, Month, Year	<i>The transformation of the financing system through the digitisation of People's Business Credit (KUR), Ultra Micro Financing (UMi), and LPDB-KUMKM reflects the government's strategic commitment to encourage the growth of digital MSMEs and strengthen national financial inclusion. This article aims to analyse the effectiveness of digital adaptive credit schemes in expanding access to finance and its impact on MSME productivity. Using a qualitative approach based on policy and literature studies, the results show that digitalisation of financial services accelerates the application process, simplifies reporting, and opens up funding opportunities for previously unbankable businesses. Challenges such as low digital literacy, credit risk, and limited infrastructure are the main obstacles. Therefore, supporting policies should include literacy training, digital data integration, and institutional strengthening to enable the programme to contribute to inclusive and sustainable economic growth.</i>
	This is an open access article under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License .
Corresponding Author: A.FAndir Akademi Bisnis Lombok	

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian nasional, berkontribusi secara signifikan terhadap lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, UMKM mewakili mayoritas bisnis yang substansial. Mereka mencakup sekitar 99% dari semua entitas bisnis dan mempekerjakan sekitar 97% dari angkatan kerja, menyoroti peran vital mereka dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (Tresnasari & Zulganef, 2023); (Pradhani et al., 2023). Selain itu, UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang menunjukkan pentingnya mereka

dalam kinerja ekonomi. Mereka merangsang kegiatan ekonomi dan mempromosikan inovasi dan inklusivitas dengan memungkinkan populasi berpenghasilan rendah untuk terlibat dalam usaha kewirausahaan (Wahyudin & Hidayat, 2023).

Meskipun kontribusinya signifikan, UMKM menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam mengakses pembiayaan konvensional. Banyak UMKM tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam manajemen keuangan, yang menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman dari sistem perbankan tradisional (Troilo et al., 2025). Khususnya, sekitar 74% UMKM tidak memiliki akses ke pembiayaan, yang sangat membatasi kapasitas operasional dan potensi pertumbuhan mereka (Sutramiani et al., 2024). Hambatan utama meliputi agunan yang tidak memadai, biaya transaksi yang tinggi, dan ketergantungan yang berlebihan pada pembiayaan utang, yang dapat menciptakan siklus ketidakstabilan keuangan. Lebih lanjut, dokumentasi yang diperlukan untuk memperoleh pinjaman seringkali di luar kemampuan atau literasi keuangan banyak pemilik UMKM, sehingga menghalangi mereka untuk memanfaatkan opsi pendanaan yang tersedia (Sarkar & Ghosh, 2024).

Tantangan-tantangan ini diperparah oleh kurangnya produk keuangan khusus yang disesuaikan dengan profil operasional dan pola arus kas UMKM yang unik (Troilo et al., 2025). Ketidadaan pilihan seperti pinjaman mikro atau pendanaan massal ekuitas mempersulit lanskap keuangan mereka, sehingga banyak UMKM kesulitan menutupi biaya operasional dasar, apalagi berinvestasi untuk pertumbuhan (Murdiono et al., 2024). Akibatnya, kesenjangan akses pembiayaan ini dapat menghambat inovasi dan daya saing yang disumbangkan UMKM terhadap perekonomian masing-masing, yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas.

Singkatnya, UMKM memainkan peran penting dalam vitalitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; namun, pertumbuhan mereka terhambat oleh berbagai tantangan dalam mengakses pembiayaan konvensional. Mengatasi hambatan keuangan ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi mereka dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) Indonesia menghadapi hambatan signifikan terkait kesenjangan digital dan keuangan. Kesenjangan digital ini ditandai dengan akses yang tidak memadai terhadap teknologi digital dan internet, yang menghalangi usaha-usaha ini untuk sepenuhnya terlibat dalam ekonomi digital yang sedang berkembang. Selain itu, kesenjangan dalam literasi digital memperburuk masalah ini, karena banyak pemilik UMKM di wilayah ini tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk secara efektif memanfaatkan perangkat digital untuk pertumbuhan bisnis dan transaksi keuangan (Fatimah et al., 2023); (Millaningtyas et al., 2024).

Di banyak daerah pedesaan dan terbelakang, infrastruktur digital yang tidak memadai mengakibatkan kesenjangan akses, sehingga menyulitkan UMKM untuk memanfaatkan platform *e-commerce* atau layanan perbankan digital. Lebih lanjut, faktor demografi seperti tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah di antara pemilik UMKM berkorelasi dengan keterlibatan digital yang terbatas. Akibatnya, komunitas ini sering kehilangan peluang ekonomi, yang selanjutnya berkontribusi pada kemiskinan dan stagnasi ekonomi (Hao, 2024); (Wang et al., 2023). Tanpa akses ke perangkat digital, UMKM sering terisolasi dari pasar dan rantai pasokan yang lebih luas, sehingga mengurangi daya saing mereka dibandingkan dengan perusahaan besar yang mendapatkan manfaat dari teknologi dan akses informasi yang lebih baik (Tartan, 2023); (Hamid et al., 2024).

Di sisi keuangan, UMKM di wilayah 3T menghadapi hambatan sistemik yang menghambat akses terhadap pembiayaan konvensional. Sejumlah besar perusahaan ini tidak memiliki riwayat kredit formal atau agunan yang memadai, yang mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional (Qiu et al., 2023). Selain itu, literasi keuangan pemilik UMKM seringkali tidak sejalan dengan kompleksitas produk keuangan yang tersedia, sehingga membatasi pemahaman dan kemampuan mereka untuk mencari pendanaan (Permoni & Oki, 2023).

Kesenjangan keuangan ini tidak hanya mencakup tantangan akses tetapi juga kecenderungan untuk bergantung pada mekanisme pinjaman informal, yang dapat menimbulkan suku bunga predator dan kondisi pembayaran yang tidak stabil. Untuk mengatasi kesenjangan ini, program kredit adaptif yang disesuaikan dengan kondisi spesifik UMKM di wilayah 3T dapat menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan digital dan keuangan. Program-program tersebut harus mencakup layanan keuangan digital yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan UMKM, seperti pinjaman mikro yang terhubung dengan verifikasi identitas digital, yang dapat mengurangi ketergantungan pada persyaratan agunan tradisional. Lebih lanjut, inisiatif pemerintah dan sektor swasta harus memprioritaskan pengembangan program literasi digital yang memberdayakan pemilik UMKM, sehingga mereka dapat memanfaatkan perangkat dan teknologi keuangan secara efektif (Atmojo et al., 2024).

Dengan membangun sistem kredit yang mudah diakses dan inklusif serta inisiatif pelatihan, para pemangku kepentingan dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih luas dan memastikan bahwa UMKM tidak hanya didukung tetapi juga menjadi peserta aktif dalam ekonomi digital (Millaningtyas et al., 2024). Kesimpulannya, kesenjangan digital dan keuangan yang saling terkait menimbulkan tantangan signifikan bagi UMKM di wilayah 3T Indonesia. Mengatasi tantangan ini melalui program kredit adaptif dan inisiatif literasi digital yang ditingkatkan dapat memfasilitasi akses ke sumber daya penting, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: bagaimana transformasi skema kredit program mendorong pertumbuhan UMKM digital, apa karakteristik kredit yang adaptif dan inklusif, serta bagaimana strategi kebijakan pemerintah dapat mengintegrasikan kedua aspek tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran kredit program dalam memperluas inklusi keuangan, menganalisis kontribusinya terhadap UMKM digital, serta menyusun rekomendasi kebijakan. Secara teoretis dan praktis, tulisan ini diharapkan memberi kontribusi signifikan bagi pengembangan literatur dan arah kebijakan publik.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipadukan dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*), untuk mengkaji secara mendalam bagaimana transformasi skema kredit program dapat mendorong pertumbuhan UMKM digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara utuh dan kontekstual. Menurut (Bogdan & Taylor, 1975), penelitian kualitatif bertujuan memahami makna fenomena sosial dalam konteks aslinya, bukan sekadar menjelaskan hubungan kuantitatif antar variabel. Dengan demikian, metode ini relevan untuk menelaah dinamika kebijakan pembiayaan yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan.

Lokasi penelitian bersifat non-fisik karena dilakukan melalui *desk study*, dengan fokus pada kebijakan pembiayaan UMKM di Indonesia, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM). Sumber data utama meliputi: (1) dokumen kebijakan resmi pemerintah seperti *Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2024* tentang pedoman KUR, panduan UMi dari Kementerian Keuangan, dan laporan tahunan LPDB-KUMKM; (2) laporan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memuat data inklusi keuangan dan perkembangan UMKM digital; serta (3) literatur ilmiah dari jurnal nasional dan internasional terkait topik pembiayaan, digitalisasi, dan kebijakan publik. Sejalan dengan pandangan (George, 2005), analisis kebijakan publik yang berkualitas harus didasarkan pada data otoritatif dan kontekstual agar hasil evaluasinya bersifat aplikatif dan konstruktif.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama. Pertama, telaah dokumen (*policy document analysis*) untuk menelusuri isi kebijakan, latar belakang pembentukannya, dan proses implementasinya. Kedua, kajian literatur untuk memperkaya perspektif analisis dan membandingkan

hasil temuan dengan studi terdahulu. (Bowen, 2009) menegaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode yang valid dalam penelitian kebijakan karena memungkinkan peneliti melacak jejak kebijakan dan memahami narasi yang membentuknya.

Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola naratif dan tema-tema besar yang muncul dari kebijakan serta implementasinya. Tahap kedua adalah analisis SWOT, yang digunakan untuk memetakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari skema kredit program berbasis digital. (Gürel & Tat, 2017) menjelaskan bahwa analisis SWOT efektif untuk menilai kondisi internal dan eksternal dalam rangka merumuskan strategi perbaikan yang tepat. Penelitian ini dibatasi pada konteks kebijakan pembiayaan UMKM di Indonesia, tanpa membahas secara mikro UMKM per sektor, guna memastikan kajian tetap fokus, mendalam, dan mudah direplikasi di masa depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Skema Kredit Program di Indonesia

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor UMKM melalui pembaruan sistem pembiayaan berbasis digital. Tiga skema utama yang menjadi fokus transformasi tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan LPDB-KUMKM. Reformasi ini sejalan dengan terbitnya regulasi terbaru, yakni Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024, yang menandai langkah besar dalam digitalisasi program KUR. Salah satu inovasi kuncinya adalah integrasi antara Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan database dari Ditjen Dukcapil serta sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA). Sinergi data ini mempermudah proses verifikasi calon penerima KUR dan mempercepat penyaluran kredit secara lebih tepat sasaran.

Sementara itu, program UMi yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga terus menyesuaikan diri dengan tuntutan era digital. Melalui kerja sama dengan lembaga non-bank seperti Pegadaian Digital dan PNM Mekaar, pelaku usaha ultra mikro kini dapat mengakses layanan pembiayaan melalui aplikasi digital. Proses pengajuan kredit yang sebelumnya rumit kini menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, pendampingan usaha pun dilakukan secara digital sehingga pelaku usaha mendapatkan arahan dan monitoring yang lebih sistematis.

Transformasi serupa juga dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM). Sejak merilis aplikasi *mobile eLPDB* pada akhir 2023, LPDB menerapkan sistem yang memungkinkan pengajuan proposal dan pemantauan progres pinjaman secara daring dan waktu nyata. Tidak berhenti di situ, berbagai platform digital lain seperti e-proposal, Cash Management System, *Online Disbursement System* (ODS), serta Geodinas aplikasi berbasis *geotagging* untuk pelaporan perjalanan dinas juga dikembangkan. Ditambah lagi dengan *platform RiDi* untuk inkubasi bisnis dan RDK untuk manajemen rapat internal.

Keseluruhan upaya ini mencerminkan pergeseran paradigma besar dari sistem pembiayaan manual dan birokratis ke arah pelayanan digital yang lebih terbuka, cepat, efisien, dan terjangkau oleh pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Pendekatan digital ini sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional secara lebih berkelanjutan.

2. Peran Kredit Program terhadap UMKM Digital

Laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 mengungkapkan bahwa tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 87,3%. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum sudah memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan, mulai dari tabungan, asuransi, hingga layanan pembayaran digital. Namun demikian, jika ditelusuri lebih dalam, masih terdapat ketimpangan serius, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Faktanya, hanya sekitar 21% UMKM yang berhasil mendapatkan pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Artinya, walaupun akses keuangan makin terbuka, tidak

serta merta pelaku usaha kecil mendapatkan kemudahan dalam memperoleh modal usaha secara adil dan merata.

UMKM, khususnya yang mulai bertransformasi ke arah digital, menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Banyak di antara mereka belum sepenuhnya memahami manajemen keuangan yang baik sebuah aspek krusial yang dikenal dengan istilah literasi keuangan. Selain itu, keterbatasan data riwayat kredit (*credit history*) membuat mereka sering dianggap tidak layak secara administratif oleh lembaga pembiayaan formal seperti bank. Kondisi ini memaksa sebagian besar pelaku UMKM untuk mengandalkan modal pribadi atau meminjam dari sumber-sumber informal yang justru berisiko tinggi dan tidak stabil.

Melihat persoalan ini, pemerintah melalui berbagai institusi keuangan menghadirkan terobosan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis digital. Inovasi ini tidak hanya memudahkan akses ke pembiayaan formal bagi UMKM, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital untuk mempercepat proses pengajuan dan pencairan dana. Data yang dirilis Bank Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan KUR digital mengalami peningkatan omzet sebesar 15–25%. Kenaikan ini didorong oleh kemudahan akses modal serta adanya pelatihan dan pendampingan dalam mengelola usaha secara digital. Program ini juga memungkinkan pelaku usaha memperluas jaringan pasar dan memperkuat branding melalui ekosistem digital yang semakin berkembang.

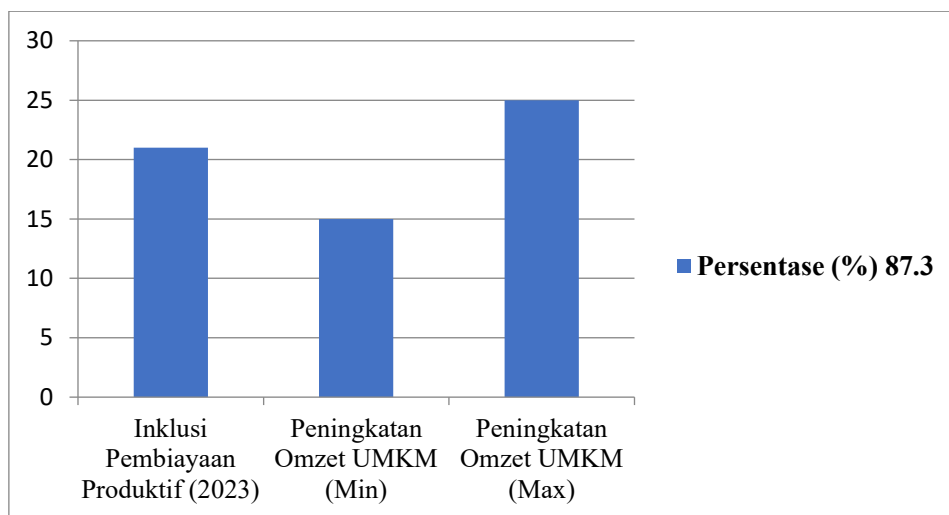
Salah satu keunggulan dari KUR digital adalah kerja sama strategis dengan berbagai platform *e-commerce* seperti *Tokopedia*, *Bukalapak*, dan *Blibli*. Kolaborasi ini memungkinkan UMKM mengintegrasikan data penjualan online mereka secara otomatis ke dalam sistem perbankan. Data transaksi *real-time* ini kemudian digunakan oleh lembaga keuangan sebagai dasar untuk menilai kelayakan pemberian kredit. Dengan kata lain, walaupun pelaku UMKM belum memiliki riwayat kredit formal, mereka tetap bisa mendapatkan akses pembiayaan berkat rekam transaksi digital yang tercatat secara sistematis.

Pendekatan ini mendapat pengakuan dari banyak lembaga internasional. Dalam laporan Bank Dunia (2022), disebutkan bahwa digitalisasi layanan keuangan mikro menjadi instrumen penting dalam menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses penilaian kredit dapat dilakukan secara lebih inklusif, cepat, dan efisien, sekaligus membuka peluang bagi UMKM di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses ke bank konvensional.

Dari perspektif pembangunan ekonomi, keberadaan KUR digital membawa angin segar bagi pertumbuhan sektor informal dan UMKM. Tidak hanya sebagai penyedia modal kerja, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat fondasi digitalisasi usaha kecil. Inisiatif ini menjadi bukti konkret bahwa inklusi keuangan sejati tidak cukup hanya dengan memperluas akses layanan keuangan, melainkan juga harus dibarengi dengan akses pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, transformasi digital dalam penyaluran kredit usaha bukan sekadar respons terhadap tantangan teknologi, tetapi merupakan strategi besar dalam mewujudkan inklusi ekonomi yang menyeluruh. Pemerataan akses pembiayaan melalui teknologi tidak hanya mengangkat daya saing UMKM di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara kolektif. Berikut adalah grafik batang tentang data inklusi keuangan dan dampak KUR digital terhadap UMKM.

Grafik 1. Data Inklusi Keuangan dan Dampak KUR Digital terhadap UMKM



3. Adaptasi Kebijakan terhadap UMKM Digital: Analisis Tematik

Transformasi lanskap ekonomi digital di Indonesia mendorong penyesuaian kebijakan pembiayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen kebijakan strategis seperti Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2024, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, serta publikasi dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), terdapat empat tema kunci yang mencerminkan adaptasi responsif pemerintah terhadap perkembangan UMKM berbasis digital.

Pertama, simplifikasi prosedur merupakan tema dominan. Pemerintah merevisi skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan memperhatikan keterbatasan aksesibilitas dari pelaku usaha kecil. Misalnya, kategori KUR Super Mikro kini tidak lagi mewajibkan agunan tambahan, sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan terbaru oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini merupakan bentuk afirmasi terhadap pelaku usaha pemula, terutama perempuan dan rumah tangga prasejahtera, yang umumnya tidak memiliki jaminan konvensional (Permenko Perekonomian No. 7/2024, Bab IV).

Kedua, tema digitalisasi proses pengajuan dan pelaporan menjadi pilar penting. Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang terintegrasi dengan data kependudukan (Ditjen Dukcapil) dan perizinan usaha (OSS RBA), serta mendukung pelaku UMKM dalam pengajuan pembiayaan secara daring. Selain itu, integrasi dengan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak juga mulai diujicoba, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada Rapat Koordinasi Nasional 2024. Ini memungkinkan pelaku UMKM digital untuk memperoleh KUR berbasis rekam jejak transaksi daring mereka.

Ketiga, kebijakan terkini menekankan pendekatan inklusif berbasis *keuangan (financial inclusion)*. Pemerintah menyadari bahwa banyak pelaku UMKM, terutama sektor informal dan pelaku usaha perempuan, belum tercakup dalam sistem keuangan formal. Oleh karena itu, kerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank (LKNB) seperti Pegadaian, PNM Mekaar, dan koperasi digital menjadi bagian integral dari strategi pembiayaan berbasis teknologi (OJK, 2024). Pendampingan digital, edukasi keuangan, serta penyaluran dana secara non-tunai menjadi ciri dari pendekatan ini.

Keempat, sinergi antar lembaga menjadi fondasi penguatan ekosistem pembiayaan UMKM digital. Terdapat koordinasi aktif antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan OJK dalam menyusun regulasi, menetapkan target inklusi keuangan nasional, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi program. Melalui Forum Koordinasi Pembiayaan UMKM (FKPU), misalnya, disepakati target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Secara keseluruhan, keempat tema tersebut mengindikasikan adaptasi kebijakan yang progresif terhadap realitas ekonomi digital. Dari orientasi birokratis dan konservatif, kebijakan UMKM kini

bergeser ke arah layanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Adaptasi ini menjadi kunci dalam mempercepat transformasi UMKM sebagai pilar ekonomi nasional yang resilien di era digital.

4. Analisis SWOT Skema Kredit Program Digital

Perubahan signifikan dalam skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan dana bergulir LPDB-KUMKM merupakan salah satu strategi penting pemerintah dalam memperluas akses keuangan yang lebih inklusif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui integrasi teknologi digital dalam setiap proses, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana, pemerintah berharap sistem ini dapat memangkas berbagai hambatan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama pelaku usaha, khususnya yang berada di wilayah terpencil.

Pemanfaatan platform digital juga diyakini dapat mempercepat layanan serta memperluas jangkauan program, termasuk menjangkau kelompok usaha yang sebelumnya tidak tersentuh oleh sistem keuangan formal. Namun, transformasi ini tentu tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi dan kelengkapan regulasi semata. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan pelaku UMKM dalam mengadopsi sistem baru tersebut, terutama dari sisi kemampuan menggunakan teknologi (*literasi digital*), pemahaman tentang pengelolaan keuangan, serta budaya usaha yang adaptif terhadap perubahan.

Di sisi lain, sinergi antar instansi seperti kementerian teknis, lembaga keuangan, pelaku fintech, serta platform e-commerce juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa koordinasi dan integrasi lintas sektor, potensi duplikasi data, kesenjangan informasi, hingga tumpang tindih kebijakan bisa menjadi penghambat utama dalam efektivitas penyaluran kredit berbasis digital ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian menyeluruh yang mampu menggambarkan dinamika dan tantangan yang dihadapi secara objektif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yang mampu memetakan faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan program. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi, pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi perbaikan program secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Analisis ini tidak hanya penting untuk perbaikan sistem, tetapi juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat praktis maupun strategis, agar digitalisasi pembiayaan UMKM benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat secara nyata dan inklusif. Berikut adalah tabel analisis SWOT.

Tabel 1. Analisis SWOT

Aspek	Analisis
Strengths	Suku bunga rendah (3–6%), tanpa agunan, proses lebih cepat melalui digitalisasi.
Weaknesses	Masih rendahnya literasi digital dan keuangan pelaku UMKM; keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil.
Opportunities	Pertumbuhan ekonomi digital, perluasan kerja sama dengan <i>fintech</i> dan <i>e-commerce</i> , dukungan regulasi inklusif.
Threats	Risiko moral hazard, kualitas kredit rendah karena lemahnya pendampingan, serta belum seragamnya data antar lembaga.

5. Evaluasi Kinerja Kredit Program dalam Mendorong UMKM Digital

Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor UMKM melalui perluasan akses pembiayaan berbasis digital. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) menjadi dua skema utama yang memainkan peran penting dalam strategi tersebut. Hingga akhir tahun 2023, realisasi penyaluran KUR telah mencapai

Rp259,8 triliun atau sekitar 87,4% dari target nasional sebesar Rp297 triliun. Dana ini tersalurkan kepada sekitar 4,64 juta debitur, mencerminkan jangkauan yang luas terhadap pelaku UMKM di berbagai sektor dan wilayah.

Sementara itu, program UMi juga menunjukkan kinerja signifikan. Sampai dengan Desember 2024, total plafon UMi yang telah disalurkan mencapai Rp44,64 triliun, menjangkau lebih dari 11,84 juta pelaku usaha ultra mikro. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan pembiayaan digital mampu merespons kebutuhan pelaku usaha kecil dan ultra mikro, khususnya dalam masa pemulihan pasca pandemi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari integrasi teknologi dalam sistem pengajuan, pencairan, dan pelaporan kredit, serta sinergi kebijakan lintas lembaga yang saling menopang. Namun demikian, capaian ini tetap perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas pelaku UMKM, pendampingan yang memadai, dan penguatan sistem tata kelola pembiayaan agar risiko seperti kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) dan moral hazard dapat diminimalisasi. Ke depan, keberlanjutan program ini akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat ekosistem digital dan kelembagaan yang menopangnya.

Selanjutnya, pada tahun 2024, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) UMKM menunjukkan tren fluktuatif, yaitu 3,98% pada Maret, naik menjadi 4,26% pada April, dan sedikit menurun menjadi 4,04% pada Juni. Kondisi ini mengindikasikan tingginya risiko pembiayaan, terutama pada UMKM berbasis digital. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM melambat menjadi 6,7% (YoY) per Juni 2024, lebih rendah dari tahun sebelumnya (7,1%). Hal ini mencerminkan kehati-hatian lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit di tengah risiko gagal bayar. Diperlukan penguatan literasi digital, pendampingan usaha, dan evaluasi sistem kredit untuk menekan risiko dan menjaga keberlanjutan pembiayaan UMKM digital. Berikut adalah tabel ringkasan kinerja pembiayaan UMKM.

Tabel 2. Ringkasan Kinerja Pembiayaan UMKM

Indikator			Periode / Angka
Realisasi KUR (akhir 2023)			Rp 259,8 triliun (87,4 % target)
Jumlah Debitur KUR (2023)			±4,64 juta pelaku usaha
Realisasi UMi (akhir 2024)			Rp 44,64 triliun
Jumlah Debitur UMi (2024)			11,84 juta pelaku ultra mikro
Rasio NPL Gross UMKM			Maret 2024: 3,98 %; April 2024: 4,26 %; Juni 2024: 4,04 %
Pertumbuhan UMKM (yoy)	Kredit		6,7 % per Juni 2024

D. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transformasi skema kredit program berbasis digital, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan LPDB-KUMKM, mampu mendorong pertumbuhan UMKM digital dan memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan analisis kebijakan, penelitian ini ingin menilai efektivitas kebijakan, memetakan tantangan, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat peran pembiayaan adaptif dalam ekosistem ekonomi digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi proses pembiayaan telah memberikan dampak nyata dalam mempercepat akses modal, menyederhanakan prosedur, dan menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya belum bankable. Integrasi SIKP dengan data Dukcapil dan OSS RBA, kemitraan

dengan platform e-commerce, serta pengembangan aplikasi digital oleh LPDB-KUMKM terbukti mempermudah verifikasi, mempercepat pencairan, dan menyediakan alternatif penilaian kelayakan kredit berbasis data transaksi digital. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur di daerah 3T, serta risiko kredit macet masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar manfaat program dapat dirasakan secara merata.

Implikasinya, keberhasilan program kredit adaptif berbasis digital tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas UMKM, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan struktur ekonomi nasional melalui pemerataan akses pembiayaan. Inisiatif ini berpotensi memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi, memperluas pasar UMKM, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Untuk itu, rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan literasi keuangan dan digital melalui pelatihan berbasis komunitas, optimalisasi pemanfaatan data alternatif dari ekosistem digital, penguatan sinergi lintas lembaga, serta penerapan sistem mitigasi risiko berbasis teknologi agar program pembiayaan ini berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, M., Darumurti, A., & Hanif, N. (2024). Agile governance in optimizing digital literacy for micro, small and medium enterprises (msme) in kulon progo regency. *Journal of Local Government Issues*, 7(1), 68–82. <https://doi.org/10.22219/logos.v7i1.29981>
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods*.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Fatimah, H., Sriningsih, S., Pascayanti, Y., & Yusuf, F. (2023). Digital divide solutions and public service policy implementation in indonesia after the covid-19 pandemic. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 6(8). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i8-30>
- George, A. L. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*.
- Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006.
- Hamid, A., Widjaja, W., Sutrisno, S., Napu, F., & Sipayung, B. (2024). The role of fintech on enhancing financial literacy and inclusive financial management in msme. *TECHNOVATE*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.52432/technovate.1.2.2024.81-88>
- Hao, Y. (2024). The impact of labor misallocation on carbon emissions in china: whether digital space matters. *Sustainability*, 16(7), 2733. <https://doi.org/10.3390/su16072733>
- Millaninytas, R., Amin, M., Hermawan, A., & Handayati, P. (2024). Digital transformation of financial literacy and inclusion as a support for convenience for msme. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (Ijhess)*, 3(5). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i5.824>
- Murdiono, A., Subagyo, S., Siswanto, E., Asandimitra, N., & Aziz, N. (2024). Design and build the social security equity crowdfunding application as funding optimization for msme. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15111>
- Permoni, N., & Oki, N. (2023). Improving financial performance through financial management, financial literacy and financial inclusion. *Artha Satya Dharma*, 16(1), 61–67. <https://doi.org/10.55822/asd.v16i1.306>
- Pradhani, S., Angelin, A., & Rizki, M. (2023). *Post-pandemic digital business strategy in bana juo restaurant tangerang, indonesia*. 65–71. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-302-3_9
- Qiu, Y., He, N., Yan, C., & Rao, Q. (2023). Whether the digital divide widens the income gap between china's regions? *Plos One*, 18(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273334>
- Sarkar, A., & Ghosh, A. L. (2024). Preferred sources of financing by msme and reasons for such preference in tripura state in north east india. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(1). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.11637>

- Sutramiani, N., Arthana, I., Lampung, P., Aurelia, S., Fauzi, M., & Darma, I. (2024). The performance comparison of dbscan and k-means clustering for msme grouping based on asset value and turnover. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.20473/jisebi.10.1.13-24>
- Tartan, C. (2023). Blockchain-based welfare distribution model for digital inclusivity. *Region*, 10(1), 19–44. <https://doi.org/10.18335/region.v10i1.434>
- Tresnasari, R., & Zulganef, Z. (2023). Increasing msme performance through institutional strengthening, entrepreneurship, and digital marketing. *International Journal of Research in Community Service*, 4(1), 11–17. <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v4i1.383>
- Troilo, M., Freeman, N., & Abe, M. (2025). Policies to address supply-side issues in msme finance: a global compilation. *The Journal of Entrepreneurship*, 34(1), 7–32. <https://doi.org/10.1177/09713557251315238>
- Wahyudin, A., & Hidayat, S. (2023). *Strategies for halal industry development through strengthening global competitive halal msme of tasikmalaya municipality*. 1747–1754. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-234-7_184
- Wang, Q., Zhang, C., & Hou, G. (2023). *Does the digital divide reduce the probability of formal employment for workers? empirical evidence based on chfs microdata*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3331031/v1>